PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk
(d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2021
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2021 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5 - 58

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	*3h,3i,5,26*	2.725.237.884	1.681.806.191
Piutang usaha	*3h,3j,6,26*	350.276.395	259.710.717
Piutang lain-lain	*3h,7,26*	10.750.000	-
Persediaan	*3k,8*	59.177.930	51.014.992
Jumlah Aset Lancar		3.145.442.209	1.992.531.900
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	*3r,24*	237.455.185	204.251.744
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.311.170.713 dan Rp13.130.602.208	*3l,9*	57.227.043.787	59.388.262.292
Jumlah Tidak Lancar		57.464.498.972	59.592.514.037
JUMLAH ASET		60.609.941.181	61.585.045.937
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	*3h,3o,10,26*	1.201.727.775	1.236.173.633
Utang lain-lain	*3h,13,26*	444.843.205	1.488.768.289
Utang pajak	*3r,11*	74.993.379	58.736.678
Biaya yang masih harus dibayar	*3h,12,26*	1.218.454.138	1.092.347.277
Utang bank - bagian jatuh tempo dalam setahun	*3h,16,26*	2.520.000.000	2.700.000.000
Utang sewa pembiayaan - bagian jatuh tempo dalam setahun	*3h,15,26*	61.829.164	167.095.839
Utang pemegang saham	*3h,3f,14*	5.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		10.521.847.661	7.743.121.716
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank	*3h,16,26*	23.623.100.000	23.713.100.000
Utang sewa pembiayaan	*3h,15,26*	8.856.955	8.856.944
Liabilitas imbalan kerja	*3s,20*	1.079.341.751	928.417.021
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		24.711.298.706	24.650.373.965
Jumlah Liabilitas		35.233.146.367	32.393.495.681
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 1.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 600.000.000 saham	*17*	60.000.000.000	60.000.000.000
Tambahan modal disetor	*18*	(11.208.617.033)	(11.208.617.033)
Defisit		(23.414.646.056)	(19.599.908.175)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		25.376.736.911	29.191.474.792
Kepentingan non-pengendali	*19*	57.903	75.464
Jumlah Ekuitas		25.376.794.814	29.191.550.256
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		60.609.941.181	61.585.045.937

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Pendapatan	*3q,21*	3.567.591.237	2.065.009.571
Beban pokok pendapatan	*3q,22*	(2.822.096.783)	(2.386.226.575)
Laba (rugi) kotor		745.494.454	(321.217.004)
Beban usaha	*3q,23*	(3.541.345.531)	(3.641.080.551)
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan jasa giro		4.825.314	10.823.208
Bunga pinjaman bank		(1.097.052.251)	(1.347.375.514)
Bunga sewa pembiayaan		(11.844.336)	(13.708.512)
Provisi bank		-	(19.818.700)
Administrasi bank		(4.531.200)	(3.736.000)
Bunga pinjaman lainnya		(41.466.670)	-
Pajak bunga		(996.956)	(1.039.267)
Lain-lain - net		98.958.294	118.851.797
Rugi sebelum pajak penghasilan		(3.847.958.882)	(5.218.300.543)
Beban pajak penghasilan	*3r,24*		
Pajak kini		-	-
Pajak tangguhan		33.203.441	13.049.225
Rugi bersih tahun berjalan		(3.814.755.442)	(5.205.251.318)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			
Pengukuran kembali imbalan pasti		-	-
Pajak atas penghasilan terkait		-	-
Rugi komprehensif tahun berjalan		(3.814.755.442)	(5.205.251.318)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(3.814.737.881)	(5.205.241.998)
Kepentingan non-pengendali		(17.561)	(9.320)
Rugi tahun berjalan		(3.814.755.442)	(5.205.251.318)
Rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(3.814.737.881)	(5.205.241.998)
Kepentingan non-pengendali		(17.561)	(9.320)
Rugi komprehensif tahun berjalan		(3.814.755.442)	(5.205.251.318)
Rugi per saham dasar	*3u,25*	(6,36)	(8,68)

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAl 30 JUNI 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Defisit	Ekuitas yang dapat diatribusikan entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2019	60.000.000.000	(11.208.617.033)	(11.021.658.226)	37.769.724.741	100.467	37.769.825.208
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	(8.542.235.400)	(8.542.235.400)	(24.941)	(8.542.260.341)
Rugi komprehensif lain	-	-	(36.014.549)	(36.014.549)	(62)	(36.014.611)
Saldo per 31 Desember 2020	60.000.000.000	(11.208.617.033)	(19.599.908.175)	29.191.474.792	75.464	29.191.550.256
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	(3.814.737.881)	(3.814.737.881)	(17.561)	(3.814.755.442)
Saldo per 30 Juni 2021	60.000.000.000	(11.208.617.033)	(23.414.646.056)	25.376.736.911	57.903	25.376.794.814

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.433.100.475	3.807.469.071
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga	(2.241.362.787)	(570.664.025)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.691.641.337)	(1.855.419.834)
Penerimaan (pembayaran):		
Penghasilan bunga	3.828.358	9.783.941
Beban keuangan	(1.154.894.457)	(1.384.638.726)
Beban pajak	(9.940.189)	(410.275.067)
Operasional lainnya	98.958.294	118.851.797
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(2.561.951.643)	(284.892.843)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(19.350.000)	(6.671.064.400)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(19.350.000)	(6.671.064.400)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang pihak berelasi	4.000.000.000	-
Pembayaran utang bank	(270.000.000)	(1.000.000.000)
Penerimaan utang bank	-	6.241.600.000
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(105.266.664)	(113.667.944)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.624.733.336	5.127.932.056
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	1.043.431.693	(1.828.025.187)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.681.806.191	2.971.233.553
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.725.237.884	1.143.208.366

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Hotel Fitra International (dahulu PT Hotel Fitra Syariah) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 24 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi S.H, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021306.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, diantaranya berdasarkan:

- Akta No. 26 tanggal 28 Mei 2018 oleh notaris Rudy Siswanto S.H., yang berkedudukan di Jakarta Utara, mengenai pernyataan keputusan rapat. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080364.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 08 Juni 2018. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, b) perubahan jangka waktu berdirinya Perusahaan menjadi jangka waktu tidak terbatas, c) penurunan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 menjadi Rp100, d) rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdanan saham-saham Perusahaan melalui pasar modal yang disertai dengan penerbitan Waran Seri-I, e) menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

- Akta No. 50 tanggal 26 Desember 2018 oleh notaris Rudy Siswanto S.H., yang berkedudukan di Jakarta Utara, mengenai pernyataan keputusan edaran para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177930.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) menyetujui untuk mengalihkan/mengoperkan hak-hak atas saham Perusahaan milik PT Gloria Inti Nusantara, b) meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perusahaan menjadi sebanyak 380.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.000.000.000.

- Akta Notaris No. 17 tanggal 14 Februari 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai keputusan para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025225.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) Menyetujui untuk mengubah status perseroan yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga selanjutnya nama perseroan menjadi PT Hotel Fitra International Tbk, b) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (Initial Public Offering) yang disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 220.000.000 saham atau 36,67% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100, c) Menyetujui rencana Perusahaan menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi pemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perusahaan melalui program Employee and Management Stock Ownership Programe (EMSOP) dengan mengalokasikan saham baru kepada karyawan sebanyak-banyaknya 132.000.000 saham biasa dalam IPO yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen Perusahaan, d) Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar perseroan,

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, diantaranya berdasarkan: (lanjutan)

e) Menyetujui rencana perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham perseroan di Bursa Efek Indonesia, f) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, g) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana hal tersebut di atas, h) Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO, i) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenal kepastian jumlah saham dalamm rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek, j) Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Akta Notaris No. 15 tanggal 27 Maret 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai keputusan para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052140.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019 antara lain menyetujui untuk menambah kegitan usaha Perseroan yaitu aktivitas Perusahaan holding.

- Akta Notaris No. 05 tanggal 18 Juni 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai kepastian jumlah dan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum perdana. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0095307.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019. Perubahan anggararan terakhir tersebut Antara lain berkaitan meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perusahaan menjadi sebanyak 600.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan akomodasi, perhotelan, pariwisata, travel dan tour. Pada saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang investasi dan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak.

Pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Gloria Inti Nusantara di mana ultimate shareholder dari PT Gloria Inti Nusantara adalah Go Ronny Nugroho. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

b. Penawaran Umum Saham Entitas Induk

Entitas Induk telah menerima Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisaris Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No. S-60/D.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp102 per saham dan 132.000.000 Waran Seri 1 yang menyertai saham biasa atas nama yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum. Saham-saham tersebut seluruhnya telah dicatatkan pada Bursa Efek tanggal 11 Juni 2019.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta No. 05 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris	: Ny. Siti Rahayu
Komisaris Independen	: Ny. Ida Haerani
Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Tn. Joni Rizal
Direktur	: Tn. Tomi Tris
Direktur	: Tn. Sukino

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang besarnya utuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar Rp210.000.000 dan tanggal 31 Desember 2020 sekitar Rp360.000.000.

Berdasarkan Surat keputusan No. 05/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan Tomi Tris sebagai Sekretaris Entitas induk.

Berdasarkan Surat keputusan No. 01/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan Bayu Prembakasih sebagai Ketua Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat keputusan No. 02/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan anggota komite audit Entitas induk adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ida Haerani, S.H., M.H
Anggota	: Evi Rosanah
	: Siswati Ningsih

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK/HFI/19 pada tanggal 4 Februari 2019, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ida Haerani, S.H., M.H
Anggota	: Sii Rahayu
	: Rini Atmaja

Pada tanggal 30 Juni 2021 jumlah karyawan sebanyak 59 orang (32 karyawan tetap, 19 karyawan kontrak serta 8 karyawan harian) dan tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan sebanyak 59 orang (32 karyawan tetap, 19 karyawan kontrak serta 8 karyawan harian).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, Entitas Anak yang dikonsolidasikan dengan persentase kepemilikan secara langsung lebih dari 50% adalah sebagai berikut:

Kepemilikan langsung

Entitas anak	Persentase pemilikan		Jumlah aset	
	Juni 2021	Desember 2020	Juni 2021	Desember 2020
PT Fitra Amanah Wisata	99,9600%	99,9600%	65.212.472	22.745.672
PT Bumi Majalengka Permai	99,9998%	99,9998%	59.511.174.327	60.660.360.416

	Lokasi	Mulai kegiatan operasi
PT Fitra Amanah Wisata	Majalengka	-
PT Bumi Majalengka Permai	Majalengka	2017

PT Bumi Majalengka Permai

PT Bumi Majalengka Permai ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 09 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi S.H, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02739.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014. Akta Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 12 tanggal 20 Juni 2019 oleh notaris Rudy Siswanto SH, mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham secara edaran. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0096462.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019.

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

PT Bumi Majalengka Permai (lanjutan)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyedian penginapan (hotel dan transit hotel), jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras, perdagangan, pembangunan (kontraktor) guna memborong segala pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum, industri, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

PT Fitra Amanah Wisata

PT Fitra Amanah Wisata ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 27 November 2017 dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto S.H., notaris di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0054083.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017.

Akta Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 24 dari notaris Rudy Siswanto, SH., notaris di Jakarta Utara, tanggal 24 April 2018, mengenai pernyataan keputusan rapat, Akta perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0060396.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 April 2018.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata yang dijual, penyediaan layanan pramuwisata, penyediaan angkutan wisata, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, tiket penjualan seni budaya, pengurusan dokumen perjalanan, visa, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif.

Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material. Amandemen ini menjelaskan definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu, juga memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai definisi material dalam rangka mengurangi pengungkapan berlebihan akibat adanya perubahan threshold definisi material.

- Amandemen PSAK 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Amandemen PSAK 15 menambahkan paragraf 14A sehingga mengatur bahwa Entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada Entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi bagian investasi neto Perusahaan pada Entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis. Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu Perusahaan menentukan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi adalah merupakan bisnis atau bukan. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambahkan panduan untuk membantu Entitas menilai apakah proses akusisi bersifat substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan pengujian konsentrasi nilai wajar opsional.

- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi - Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".

  Amandemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi penanggung, yaitu:

  a. Pendekatan penundaan: pengecualian sementara dari penerapan PSAK 71 kepada Perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK 62 (yang berlaku di tingkat Perusahaan pelapor); dan
  b. Pendekatan berlapis: memungkinkan Perusahaan untuk mereklasifikasi beberapa pendapatan atau beban yang timbul dari aset keuangan tertentu dari laba rugi ke pendapatan komprehensif lain.

- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK 71 mengubah paragraf PP4.1.11 (b) dan PP4.1.12 (b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A untuk mengatur aset keuangan dengan fitur pembayaran yang dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan jumlah pendapatan dapat diakui. PSAK 72 memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan yang akan diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan pedoman khusus yang mengharuskan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan atau memenuhi suatu kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu pada pengalihan barang dan jasa kepada pelanggan. PSAK 72 ini menggantikan PSAK 23 "Pendapatan", PSAK 34 "Kontrak Konstruksi", PSAK 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan", ISAK 21 "Perjanjian Konstruksi Real Estat" dan ISAK 27 "Pengalihan Aset Dari Pelanggan ".

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 73 "Sewa", PSAK 73 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur semua sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang serupa dengan akuntansi untuk sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 mengatur dua pengecualian untuk penyewa yang terkait dengan model akuntansi, yaitu untuk sewa dengan aset bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa mengakui kewajiban membayar sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasari selama masa sewa. Penyewa juga akan secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan aset sewaan. Akuntansi pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan terus mengklasifikasikan semua sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana diatur dalam PSAK 30. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 "Sewa", dan interpretasinya berdasarkan ISAK 8 "Menentukan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa", ISAK 23 "Sewa Operasi - Insentif", ISAK 24 "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Sewa Dalam Bentuk Hukum" dan ISAK 25 "Hak Atas Tanah".

- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba". ISAK 35 mengatur ruang lingkup penyajian laporan keuangan Entitas berorientasi nonlaba tanpa memandang bentuk hukum Entitas. Interpretasi ini juga dapat diterapkan oleh Entitas yang berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Non Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). ISAK 35 menggantikan PSAK 45 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba" berdasarkan PPSAK 13 tentang Pencabutan PSAK 45 "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi". Kontrak asuransi mengharuskan Entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi yang diterbitkan, minimal, ke dalam kelompok kontrak yang memberatkan pada pengakuan awal, kelompok kontrak pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk kemudian menjadi kontrak yang merugi, dan kelompok kontrak yang tersisa dalam portofolio.

  PSAK 74 juga mengatur bahwa kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. Arus kas kepatuhan mencakup estimasi arus kas masa depan dan penyesuaian untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas masa depan, serta penyesuaian terhadap risiko non-keuangan. Pendekatan ini dimodifikasi untuk mengukur grup kontrak reasuransi yang dimiliki dan grup kontrak asuransi dengan fitur partisipasi diskresi. Namun, Entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi untuk mengukur kontrak asuransi jika kontrak tersebut memenuhi kriteria tertentu.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (lanjutan)

PSAK 74 juga mensyaratkan Entitas untuk memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi, dan pendapatan atau beban keuangan. Pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak termasuk komponen investasi. Pendapatan asuransi adalah total perubahan kewajiban untuk sisa periode pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang pembayarannya diharapkan oleh Entitas. PSAK 74 ini akan menggantikan PSAK 62 "Kontrak Asuransi".

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Grup telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Grup atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan baru dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan baru dan revisi yang telah diterbitkan diatas, dan yang berlaku efektif pada tahun buku 1 Januari 2020 tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi penerapan beberapa SAK baru dan yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", termasuk PSAK No.1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengukapan". PSAK revisi ini mengubah pengelompokkan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Kelompok Usaha.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan *(historical cost)* menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Beberapa akun disajikan dengan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Ketika Grup menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Grup mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada awal periode komparatif yang disajikan.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian" secara retrospektif. PSAK 65 menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan menggantikan ISAK 7 "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus ".

PSAK ini mensyaratkan entitas induk (entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor mengendalikan investee.

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

a. kekuasaan atas investee (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas investee, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

a. pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari investee;
b. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
c. hak suara dan hak suara potential investor

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Prosedur Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian:

- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya;
- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak;
- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi antara entitas-entitas dalam Kelompok Usaha.

Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat entitas anak. Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas. Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dari kelompok usaha dan NCI, meskipun hal tersebut mengakibatkan NCI memiliki saldo deficit atas dasar kepentingan kepemilikan sekarang.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

a. menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
b. mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tesebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan, atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
c. mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi

Entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22 (Revisi 2009) "Kombinasi Bisnis" ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut.

Entitas investasi adalah entitas yang:

a. memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
b. menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
c. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar.

Entitas diyaratkan untuk mempertimbangkan semua fakta dan keadaan apakah entitas merupakan entitas investasi, termasuk tujuan dan desainnya seperti:

a. memiliki lebih dari satu investasi;
b. memiliki lebih dari satu investor;
c. memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas;
d. memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Jika tidak terdapat karakteristik khusus tersebut tidak berarti mendiskualifikasikan entitas dari pengklasifikasian sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakterisktik khusus tersebut memberikan pengungkapan tambahan yang disyaratkan oleh PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Entitas investasi disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Karena entitas investasi tidak disyaratkan untuk mengonsolidasi entitas anaknya, transaksi pihak berelasi intra kelompok usaha dan saldo tidak dieliminasi.

Sebagaimana diatur dalam PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri", laporan keuangan tersendiri (entitas induk) dapat disajikan hanya jika laporan tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi di entitas anak, asosiasi dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Pengecualian terhadap konsolidasi hanya diterapkan pada entitas investasi tesebut. Oleh karenanya entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi. Persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Biaya suatu akuisisi diakui sebagai penjumlahan atas imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas kepentingan nonpengendali dientitas yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan nonpengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset neto) dicatat sebagai goodwill. Dalam kondisi sebaliknya, Perusahaan mengakui selisih kurang tersebut sebagai keuntungan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba atau rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap Kepentingan Non Pengendali (NCI) atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kombinasi bisnis tersebut terlepas apakah aset dan liabilitas lainnya dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas (UPK) dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi entitas anak, entitas asosiasi atau bisnis dan nilai wajar bagian Entitas Induk atas aset neto entitas anak/entitas asosiasi atau bisnis yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Goodwill dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapakan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode terjadinya kombinasi bisnis dan periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan modal disetor".

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan
   vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a).
   vii orang yang didentifikasikan dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (revisi 2011), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing". PSAK revisi mengatur bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan konsolidasian ke dalam suatu mata uang penyajian. Setiap entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsional. PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pembukuan Kelompok Usaha diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dalam mata uang asing dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, kecuali untuk keuntungan pertukaran dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing ke mata uang penyajian Perusahaan yang diakui langsung dalam pendapatan komprehensif lain.

Kurs tengah yang digunakan Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing:

	2021	2020
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	Rp14.496	Rp14.105

h. Instrumen Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" termasuk Amandemen PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK No. 71 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok utangnya dan Grup juga menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Keuangan Instrumen: Pengungkapan". PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan/kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat di saling hapus.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam penyediaan instrumen secara kontraktual. Semua aset keuangan diakui dan tidak diakui berdasarkan tanggal perdagangan di mana pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan baik pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan.

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:
- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) selanjutnya diukur pada FVTPL.

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Suku Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur kemudian pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit.

Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Suku Bunga Efektif (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (yaitu aset yang mengalami penurunan nilai kredit pada pengakuan awal), suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur dari instrumen utang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto dari instrumen utang pada pengenalan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam item baris "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Bunga".

Investasi dalam Instrumen Utang yang Diklasifikasikan sebagai FVOCI

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam judul cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada FVOCI

Aset keuangan disimpan untuk diperdagangkan jika:
- diakuisisi terutama untuk tujuan menjualnya dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan teridentifikasi yang dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan laba jangka pendek aktual terkini;
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Investasi dalam Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada FVOCI (lanjutan)

Investasi dalam instrumen ekuitas pada FVOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penhasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan akan ditransfer ke saldo laba ditahan.

Pendapatan dividen dari investasi dalam instrumen ekuitas ini diakui dalam laba rugi ketika hak Grup untuk menerima dividen ditetapkan, kecuali dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam baris rincian "Pendapatan Keuangan – Pendapatan Dividen" dalam laba rugi.

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar (default) yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (default) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (default) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit Meningkat Signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Grup mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur entitas beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (think-tanks) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Grup secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen hutang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasehat hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat aset keuangan tersebut dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Grup tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Grup mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Grup tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar hasil yang diterima.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Entitas pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba ditahan.

Liabilitas Keuangan

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:
- telah diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh entitas dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif, kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan pada FVTPL disajikan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sepanjang hal tersebut bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lain-lain".

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit sendiri dari liabilitas tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan nilai wajar karena selain risiko kredit sendiri dari liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan kemudian tidak direklasifikasi ke laba rugi; sebagai gantinya, dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, untuk biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, kewajiban Grup dilepaskan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup menukar dengan pemberi pinjaman yang eksis, suatu instrumen utang ke instrumen lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup mencatat modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

Diasumsikan bahwa persyaratannya secara substansial berbeda jika nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas menurut persyaratan baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskontokan menggunakan tarif efektif awal sekurang-kurangnya 10 persen berbeda dari nilai wajar yang didiskontokan atas nilai sisa arus kas dari liabilitas keuangan awal. Jika modifikasi tidak substansial, perbedaan antara: (1) nilai tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini arus kas setelah modifikasi harus diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lain.

Pengaturan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menghapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk kompensasi harus tersedia saat kini daripada bergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal dan dalam hal terjadi gagal bayar (default), keadaan tidak dapat membayar (insolvency) atau kebangkrutan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Dampak atas Transisi PSAK No. 71

Grup telah mengevaluasi klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis, serta metode kerugian ekspetasian untuk mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu.

Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK No. 71 dan tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020 disebabkan instrumen keuangan Grup pada umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

j. Piutang Usaha

Piutang usaha dinyatakan sebesar jumlah nominal setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penurunan nilai piutang ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada akhir periode yang bersangkutan.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan Grup ditentukan dengan menggunakan metode first-in, first-out (FIFO). Nilai realisasi neto ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi neto.

l. Aset Tetap

Grup menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) "Aset Tetap", termasuk PSAK 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap" dan Amandemen 2015 PSAK 16 "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika Grup menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Aset Tetap (Lanjutan)

Amandemen 2015 PSAK No. 16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Grup telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Persentase (%)	Masa manfaat (Tahun)
Bangunan	5%	20
Convention hall	5%	20
Prasarana	12,5%	8
Mesin dan peralatan	12,5%	8
Kendaraan	12,5% - 25%	4 - 8
Peralatan dan perabotan	25%	4

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan HGB diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan, Neto" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lain pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Aset Tetap Dalam Pengembangan

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penyusutan mulai dibebankan sejak tanggal aset tersebut siap untuk digunakan untuk tujuan penggunaannya.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset atau Cash General Unit (CGU) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali berkaitan dengan aset revaluasian dimana rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi di OCI.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi kecuali terkait dengan aset revaluasian dimana pembalikan diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi dalam OCI.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Bunga dan beban keuangan lainnya yang timbul dari pinjaman yang diperoleh untuk mendanai perolehan dan pengembangan tanah dan serta pembangunan bangunan dikapitalisasi ke persediaan dan tanah untuk pengembangan, yang mana lebih sesuai. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi terdiri dari beban bunga, beban bank dan selisih kurs yang terjadi sehubungan dengan perolehan pinjaman tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Besarnya biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam suatu periode ditentukan berdasarkan tingkat kapitalisasi dikalikan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk perolehan, pematangan dan pembangunan tahun berjalan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak- pihak terkait dalam kontrak;
   - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
   - Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Utang usaha" dan "Liabilitas lain-lain".

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pelanggan, yang pada umumnya bertepatan dengan pengiriman dan penerimaan barang yang dijual. Pendapatan tidak diakui sejauh ada ketidakpastian yang signifikan mengenai pemulihan jumlah imbalan, biaya terkait, atau kemungkinan pengembalian barang.

Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Selain itu, Grup juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Perusahaan atau Para Pemegang Saham".

PSAK 46 (Penyesuaian 2018) menegaskan konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambahkan paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika Grup mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan berhubungan lebih langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan keuntungan yang dapat didistribusikan daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, Grup mengakui konsekuensi pajak penghasilan dalam laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal Grup atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29/1996 tanggal 18 April 1996, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34/2017 tanggal 6 September 2017 mengenai persewaan tanah dan atau bangunan yang melingkupi kegiatan usaha utama Perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final ("PPh Final") sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 ini dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Penghasilan dan beban lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut dan belum dikenakan PPh Final lainnya dikenakan pajak penghasilan badan ("PPh Pasal 29") dengan tarif sebesar 22% pada 31 Desember 2020 dan 25% pada 31 Desember 2019.

s. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), "Imbalan Kerja" dan Amandemen 2015 PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", termasuk Penyesuaian 2016 PSAK No. 24. Selain itu, Grup juga mengadopsi ISAK No. 15, "PSAK No. 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya" dan amandemen tahunan 2018 PSAK 24: "Imbalan Kerja tentang Kurtailmen, atau Program Penyelesaian dan Penyesuaian".

PSAK revisi ini, memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban (aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (vested), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan "koridor"), meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen 2015 PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

s. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Amandemen 2018 PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi Grup dalam mengakui biaya jasa lalu, penyelesaian keuntungan dan kerugian, biaya jasa kini dan bunga bersih setelah amandemen, kurtailmen, atau program penyelesaian karena semuanya tersebut menggunakan asumsi aktuaria terbaru (sebelumnya digunakan asumsi aktuaria pada awal periode pelaporan tahunan).

Grup mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pengakuan

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada ketika dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:
1. biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
2. bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode diakui dalam laporan laba rugi;
3. pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:
   - keuntungan dan kerugian aktuarial;
   - timbal balik aset program;
   - setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

Pengukuran

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuaria, atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuaria. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti Grup dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir.

Hal ini mensyaratkan Grup untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun tahun akhir akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar metode garis lurus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan perubahan program atau mengubah imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

s. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan tanggal ketika Grup mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, liabilitas imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun Grup tidak disyaratkan untuk membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama.

t. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan atau Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi. Standar mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis.

u. Laba Per Saham

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011) "Laba per Saham". PSAK 56 (Revisi 2011) ini menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

v. Biaya Emisi Saham

Seluruh beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Entitas Induk kepada masyarakat dicatat sebagai pengurang akun "Tambahan Modal Disetor" yang merupakan komponen ekuitas di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian .

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Grup untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Grup mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi. Namun demikian, adalah mungkin, hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Entitas memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan, yang memerlukan penilaian terhadap kegiatan yang relevan dan ketika keputusan sehubungan dengan kegiatan tersebut mensyaratkan persetujuan suara bulat. Entitas menentukan bahwa kegiatan yang relevan untuk pengaturan bersama adalah mereka yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasi dan modal dari pengaturan.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Pengaturan Bersama (lanjutan)

Pertimbangan dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian terhadap Entitas Anak, sebagaimana tercantum dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian".

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama. Mengklasifikasikan pengaturan mengharuskan Entitas untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. Secara khusus Entitas mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah pengaturan bersma tersebut terstruktur melalui kendaraan
- Ketika pengaturan terstruktur melalui kendaraan terpisah, Entitas juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk hukum dari kendaraan terpisah.
  - persyaratan kontraktual dalam pengaturan.
  - fakta lain yang relevan dan keadaan.

Penilaian sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Sebuah kesimpulan yang berbeda tentang pengendalian bersama dan apakah pengaturan adalah operasi bersama atau ventura bersama, dapat mempengaruhi akuntansi secara material.

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan.Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Entitas mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan.

Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Entitas membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui. Entitas menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Entitas juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kas	22.182.150	32.401.062
Bank Rupiah:		
PT Bank Central Asia, Tbk	1.865.020.143	1.075.532.235
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	662.589.752	332.798.871
PT Bank Jawa Barat	136.803.311	204.934.986
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	38.642.528	36.139.037
Jumlah	2.725.237.884	1.681.806.191

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya dan yang ditempatkan pada pihak berelasi.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Guest	256.013.296	226.122.613
Guest ledger	90.044.099	16.981.708
OTA	3.200.000	9.658.500
BCA card	1.019.000	3.813.496
BNI card	-	3.134.400
Jumlah	350.276.395	259.710.717

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Sampai dengan 1 bulan	350.276.395	259.710.717
Jumlah	350.276.395	259.710.717

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, semua piutang usaha Grup merupakan piutang dalam mata uang Rupiah. Manajemen Grup berpendapat bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Karyawan	10.750.000	-
Jumlah	10.750.000	-

Pada tanggal 30 Juni 2021, piutang karyawan Grup merupakan piutang dalam mata uang Rupiah. Manajemen Grup berpendapat bahwa piutang karyawan tersebut dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Food	45.263.766	38.235.838
Pengharum & Pembersih	4.482.289	5.386.144
Fruit & Beverage	7.043.362	4.960.489
Gas	2.388.513	2.432.521
Jumlah	59.177.930	51.014.992

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat persediaan Perusahaan yang diasuransikan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat penurunan nilai persediaan dan barang usang, sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan berkaitan dengan hal tersebut.

9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	16.259.000.000	-	-	16.259.000.000
Bangunan	30.824.200.000	-	-	30.824.200.000
Convention hall	11.922.190.100	-	-	11.922.190.100
Prasarana	5.894.495.993	-	-	5.894.495.993
Mesin dan peralatan	1.417.269.800	-	-	1.417.269.800
Kendaraan	992.757.037	-	-	992.757.037
Perlengkapan & perabotan	5.208.951.570	19.350.000	-	5.228.301.570
Jumlah	72.518.864.500	19.350.000	-	72.538.214.500
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	5.515.421.875	770.872.009	-	6.286.293.884
Convention hall	530.062.129	298.054.752	-	828.116.881
Prasarana	2.607.326.330	368.406.000	-	2.975.732.330
Mesin dan peralatan	562.995.848	88.579.362	-	651.575.210
Kendaraan	266.892.750	62.655.439	-	329.548.189
Perlengkapan & perabotan	3.647.903.276	592.000.943	-	4.239.904.219
Jumlah	13.130.602.208	2.180.568.505	-	15.311.170.713
Nilai buku	59.388.262.292			57.227.043.787

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	16.259.000.000	-	-	16.259.000.000
Bangunan	30.783.750.000	40.450.000	-	30.824.200.000
Convention hall	6.638.400.000	5.283.790.100	-	11.922.190.100
Prasarana	5.894.495.993	-	-	5.894.495.993
Mesin dan peralatan	1.202.269.800	215.000.000	-	1.417.269.800
Kendaraan	992.757.037	-	-	992.757.037
Perlengkapan & perabotan	4.036.677.270	1.172.274.300	-	5.208.951.570
Jumlah	65.807.350.100	6.711.514.400	-	72.518.864.500
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	3.976.234.375	1.539.187.500	-	5.515.421.875
Convention hall	-	530.062.129	-	530.062.129
Prasarana	1.870.514.331	736.811.999	-	2.607.326.330
Mesin dan peralatan	388.232.956	174.762.892	-	562.995.848
Kendaraan	140.973.745	125.919.005	-	266.892.750
Perlengkapan & perabotan	2.396.882.178	1.251.021.098	-	3.647.903.276
Jumlah	8.772.837.585	4.357.764.623	-	13.130.602.208
Nilai buku	57.034.512.515			59.388.262.292

Beban penyusutan pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Beban pokok pendapatan	1.475.484.059	2.926.783.203
Beban umum dan administrasi	705.084.446	1.430.981.419
Jumlah	2.180.568.505	4.357.764.623

Tanah, bangunan dan convention hall milik PT Bumi Majalengka Permai, entitas anak, luas tanah 5.357m2 dengan bukti kepemilikan Sertifikat SHGB No. 00212 luas 3.037m2, SHGB No. 00213 luas 1.190m2, SHGB No. 00214 luas 1.130m2 dan bangunan milik PT Bumi Majalengka berupa bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 113 kamar dengan luas bangunan 3.900m2 yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kel, Majalengka Kulon, Kec, Majalengka, Jawa Barat. Tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh PT Bumi Majalengka Permai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 15).

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada BCA Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp707.950.000 dan Rp908.824.000, gedung, mesin, persediaan, perlengkapan hotel dan kantor, per tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp38.197.760.000, convention hall per tanggal 30 Juni 2021 diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta dengan nilai pertanggungan sebesar Rp7.091.500.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perseroan, tidak terdapat asset tetap yang tidak dipakai sementara, tidak terdapat asset tetap yang berasal dari hibah dan yang dihentikan dari penggunaan aktif, dan tidak terdapat asset tetap yang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020.

10. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Utang supplier	1.201.727.775	1.236.113.633
Lain-lain	-	60.000
Jumlah	1.201.727.775	1.236.173.633

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pda tanggal 31 Desember 2020, semua utang usaha Perusahaan merupakan utang dalam mata uang Rupiah.

11. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PPh pasal 23	148.660	-
Pajak pembangunan 1	74.844.719	58.736.678
Jumlah	74.993.379	58.736.678

12. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Service charge	1.157.775.296	1.032.105.019
BPJS	22.058.819	19.824.258
Lain-lain	38.620.023	40.418.000
Jumlah	1.218.454.138	1.092.347.277

13. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Deposit pelanggan	399.589.828	1.335.833.500
Deposit transfer	45.253.377	117.136.057
Deposit voucher	-	35.798.732
Jumlah	444.843.205	1.488.768.289

14. UTANG PEMEGANG SAHAM

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Jon Fieris	5.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	5.000.000.000	1.000.000.000

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2021, Utang kepada Jon Fieris merupakan pinjaman Perusahaan dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000 yang dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan, dengan bunga 5% per tahun (dibayarkan setiap bulan) dan jangka waktu 1 tahun (365 hari) terhitung sejak tanggal Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 April 2021, Utang kepada Jon Fieris merupakan pinjaman Perusahaan dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000 yang dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan, dengan bunga 5% per tahun (dibayarkan setiap bulan) dan jangka waktu 1 tahun (365 hari) terhitung sejak tanggal Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 3 November 2020, Utang kepada Jon Fieris merupakan pinjaman Perusahaan dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 yang dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan, dengan bunga 5% per tahun (dibayarkan setiap bulan) dan jangka waktu 1 tahun (365 hari) terhitung sejak tanggal Perjanjian.

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang sewa pembiayaan merupakan utang kepada PT BCA Finance atas pembelian kendaraan oleh PT Bumi Majalengka Permai, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Liabilitas – awal	175.952.783	403.744.333
Liabilitas yang timbul selama tahun berjalan	-	-
Jumlah	175.952.783	403.744.333
Penyelesaian selama tahun berjalan	105.266.664	227.791.550
Liabilitas – akhir	70.686.119	175.952.783
Liabilitas jatuh tempo dalam setahun	61.829.164	167.095.839
Liabilitas jangka panjang	8.856.955	8.856.944

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Utang sewa pembiayaan ini dikenai bunga berkisar 3,6% - 8,67% flat p.a

Beban bunga dari utang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, disajikan sebagai "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

16. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk		
Kredit Investasi - 1	17.898.100.000	18.033.100.000
Kredit Investasi - 3	8.245.000.000	8.380.000.000
Jumlah	26.143.100.000	26.413.100.000
Utang bank bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun:		
Kredit Investasi - 1	2.160.000.000	2.250.000.000
Kredit Investasi - 3	360.000.000	450.000.000
Jumlah	2.520.000.000	2.700.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	23.623.100.000	23.713.100.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.059 pada tanggal 27 April 2016. PT Bumi Majalengka Permai memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Kredit Investasi (Baru)

Fasilitas Term Loan (TL), dengan tujuan fasilitas untuk pembangunan Hotel Fitra di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum	: Rp25.000.000.000
Bentuk	: Aflopend
Availability period	: 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatangan PK
Jangka waktu	: 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 18 bulan grace periode selama masa pembangunan dan operasional awal.
Bunga	: 12,75%
Commitment fee	: 1% dari maksimum kredit
Biaya administrasi	: Rp10.000.000
Jaminan	:

- HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
- IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Baru) (Lanjutan)

Jaminan :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Bukti kepemilikan :
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-051/BLP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp32.750 juta
   - Akan ditutup asuransi construction all risk selama masa pembangunan
   - Akan ditutup asuransi kebakaran setelah bangunan selesai dibangun (nilai penutupan akan disesuaikan pada saat bangunan selesai dibangun).
2. Project Cost Bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 101 kamar berikut perlengkapan hotel. Cfm. Feasibility Study Project Cost Hotel Fitra Majalengka.
   - Laporan Studi Kelayakan PT Kusuma Real Sakti No. KRS-08/BLP-FS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016
3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - HGB No. 00214 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST 083/BLP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp9.744 juta
4. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
5. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.062 pada tanggal 27 April 2016. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan tujuan fasilitas untuk pembayaran sebagian bunga selama masa pembangunan Hotel Fitra di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum	: Rp1.500.000.000
Bentuk	: Aflopend
Jangka waktu	: 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 18 bulan masa penarikan KI IDC.
Bunga	: 12,75%
Commitment fee	: 1% dari maksimum kredit
Biaya administrasi	: Rp5.000.000
Jaminan	:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-051/BLP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp32.750 juta
   - Akan ditutup asuransi construction all risk selama masa pembangunan
   - Akan ditutup asuransi kebakaran setelah bangunan selesai dibangun (nilai penutupan akan disesuaikan pada saat bangunan selesai dibangun).

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Baru) (Lanjutan)

Jaminan :

2. Project Cost Bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 101 kamar berikut perlengkapan hotel. Cfm. Feasibility Study Project Cost Hotel Fitra Majalengka.
   - Laporan Studi Kelayakan PT Kusuma Real Sakti No. KRS-08/BLP-FS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016
3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - HGB No. 00214 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST 083/BLP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp9.744 juta
4. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
5. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

Kredit Investasi (Tambahan)

Berdasarkan surat persetujuan tambahan struktur fasilitas kredit No. JRM/1/402/R pada tanggal 25 Juli 2019. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tambahan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan tujuan fasilitas untuk pembangunan Aula (Meeting Room) dan lahan parker, di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum	: Rp9.000.000.000
Bentuk	: Aflopend
Jangka waktu	: 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 12 bulan grace period selama masa pembangunan dan operasional awal.
Bunga	: 12,75%
Commitment fee	: 1% dari maksimum kredit
Biaya administrasi	: Rp10.000.000
Jaminan	:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
2. Dua bidang tanah berikut bangunan Convention Hall diatasnya yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat.
   Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 & No. 00214 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 645/145/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 12 April 2018
3. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
4. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Tambahan) (Lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan kredit (persetujuan restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.JRM/1/369/R pada tanggal 22 Mei 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui restrukturisasi fasilitas kredit Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Suku bunga 11,25% per tahun berlaku selama 12 bulan dengan pembebanan sebagai berikut:
   - 8% (delapan persen) per tahun efektif dan sisanya 3,25% (tiga koma dua pulh lima persen) per tahun dibayarkan setelah IBP berakhir, berlaku sejak tanggal 26 Mei 2020. tarif bunga ini akan direview pada 3 (tiga) bulan pertama, selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan kondisi usaha, serta syarat dan ketentuan yang berlaku di BNI.
   - Jangka waktu IBP 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK).
   - Jangka waktu angsuran IBP adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak masa IBP berakhir.
2. *Interest Baloon Payment* (IBP) Kredit Investasi

Maksimum kredit	:	Rp30.103.160 dan setiap bulan akan diupdate dan diakumulasi sesuai dengan realisasi pada saat pendudukan IBP.
Keperluan	:	Pembebanan selisih bunga kredit investasi selam 12 bulan sejak penandatangan PPPK.
Bentuk	:	Aflopend
Jangka waktu	:	12 bulan sejak masa IBP terakhir
Booking office	:	BNI KC Senayan

3. Perpanjangan jangka waktu *grace period* atas fasilitas kredit investasi maksimum kredit Rp9.000.000.000 semula grace period atau dalam hal ini sampai dengan Juli 2020, menjadi sampai dengan April 2021.
4. Perpanjangan jatuh tempo jangka waktu atas fasilitas kredit investasi
   - Kredit investasi Rp25.000.000.000 semula sampai dengan April 2024 menjadi sampai dengan April 2025
   - Kredit investasi Rp9.000.000.000 semula sampai dengan April 2026 menjadi sampai dengan April 2027
5. Lain-lain
   - Restrukturisasi kredit dilakukan dalam rangka penyelamatan.
   - Apabila terdapat excess cash, wajib melakukan setoran untuk mengurangi utang pokok dan akan mengurangi kewajiban pokok bulan terakhir.
   - Wajib optimalkan produk BNI lainnya
   - Lain-lain sesuai SKK Nomor JRM/1/292/R tanggal 14 April 2016 untuk fasilitas kredit investasi maksimum Rp25.000.000.000 dan SKK Nomor JRM/1/402/R tanggal 25 Juli 2019 untk fasilitas kredit investasi maksimum Rp9.000.000.000

Berdasarkan surat keputusan kredit (persetujuan restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.JRM/1/418/R pada tanggal 28 April 2021. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui restrukturisasi fasilitas kredit Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas kredit	:	Kredit Investasi I (KI I)
Maksimum	:	Rp25.000.000.000 dengan outstanding per 16 Maret 2021 sebesar Rp18.083.100.000
Keperluan	:	Restrukturisasi kredit atas pembangunan Fitra Hotel Majalengka

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Tambahan) (Lanjutan)

Bentuk	: Aflopend
Availability period	: 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatangan PK
Jangka waktu	: Sampai dengan tanggal 25 April 2026
Bunga	: 11,25% per tahun
Fasilitas kredit	: Kredit Investasi II (KI II)
Maksimum	: Rp9.000.000.000 dengan outstanding per 16 Maret 2021 sebesar Rp8.380.000.000
Keperluan	: Restrukturisasi kredit atas pembangunan Convention Hall Fitra Hotel Majalengka
Bentuk	: Aflopend
Jangka waktu	: Sampai dengan tanggal 26 April 2027
Bunga	: 11,25% per tahun
Fasilitas kredit	: Interest Baloon Payment (IBP) KI
Maksimum	: Rp789.989.584 atau sesuai saat pendudukan IBP
Keperluan	: Pembebanan bunga yang ditangguhkan atas fasilitas KI sejak Mei 2020 sampai dengan Maret 2021
Bentuk	: Aflopend
Jangka waktu	: Sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
Jaminan	:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka,
   Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
2. Dua bidang tanah berikut bangunan Convention Hall diatasnya yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat.
   Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 & No. 00214 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 645/145/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 12 April 2018
3. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.

Berdasarkan surat No. JRM/1/215 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Selama pinjaman terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bumi Majalengka Permai dilarang melakukan aktivitas antara lain:
   - Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang.
   - Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), hal ini dapat disetujui atas perubahan pemegang saham PT Bumi Majalengka Permai yang mana tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).

16. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Tambahan) (Lanjutan)

b. Restrukturisasi atas Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan dapat dilakukan kepada pemegang saham dan pengurus yang sudah listing (tercatat di bursa saham) dengan syarat memiliki kompetensi di bidangnya (perhotelan dan wisata.)
c. Permohonan pencabutan Personal dan *Corporate Guarantee* tidak dapat dilakukan karena Perseroan belum menghasilkan laba dan masih bergantung pada pemegang saham.
d. Hasil dana IPO, hanya digunakan untuk pengembangan usaha dan bukan untuk melunasi utang pemegang saham.
e. Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/peyertaan pada perusahaan lain, dapat dilakukan selama Marger, Akuisisi, tidak akan merubah pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
f. Menerbitkan/mejual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara Notariil, Dapat dilakukan karena penjualan saham untuk kepentingan ekspansi bisnis yang akan memperkuat struktur modal dan tidak akan mengubah struktur pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).

Beban bunga dari utang bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, disajikan sebagai "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

17. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta No. 19 dari notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 23 April 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0057485.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 23 April 2018, para pemegang saham menyatakan, menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp2.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp500.000.000 menjadi sebesar Rp28.000.000.000, yang mana penambahan modalnya sebesar Rp27.500.000.000 diambil bagian oleh para pemegang saham sebagai berikut:

a. PT Gloria Inti Nusantara sebanyak 220.000 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.000.000.000
b. Tn. Jon Fieris sebanyak 55.000 saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.500.000.000

Akta No. 26 dari notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080364.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 08 Juni 2018, para pemegang saham menyatakan, menyetujui modal dasar Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Berdasarkan akta No. 50 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 26 Desember 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177930.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018, mengenai pernyataan keputusan edaran para pemegang saham antara lain berkaitan dengan:

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

a. Menyetujui untuk mengalihkan/mengoperkan hak-hak atas saham Perusahaan milik PT Gloria Inti Nusantara, kepada Ivan Sindoro berdasarkan Akta Jual Beli saham dibawah tangan bermaterai cukup No. 326/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 50.958.000 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan) lembar saham dengan presentase kepemilikan 13,41%, kepada Rudy Gunawan berdasarkan Akta Jual Beli saham dibawah tangan bermaterai cukup No. 327/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 43.042.000 (empat puluh tiga juta empat puluh dua ribu) lembar saham dengan presentase kepemilikan 11,33%, dan kepada Hendra Sutanto berdasarkan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham dibawah tangan bermaterai cukup No.328/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) lembar saham dengan presentase kepemilikan 7,89%.

b. Meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan menjadi sebanyak 380.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.000.000.000 yang berasal berasal dari kapitalisasi pinjaman dari pemegang saham/konversi piutang pemegang saham yaitu piutang Jon Fieris kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan utang dengan konversi tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), piutang PT Gloria Inti Nusantara dengan Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan utang pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah).

Berdasarkan akta No. 05 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 18 Juni 2019, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0095307.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, mengenai kepastian jumlah saham dan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum perdana, menyatakan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan catatan administrasi yang dikelola oleh PT Lotus Andalan Sekuritas, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rp)
PT Gloria Inti Nusantara	180.000.000	30,00%	18.000.000.000
Tn. Jon Fieris	76.000.000	12,67%	7.600.000.000
Tn. Ivan Sindoro	50.958.000	8,49%	5.095.800.000
Tn. Rudy Gunawan	43.042.000	7,17%	4.304.200.000
Tn. Hendra Sutanto	30.000.000	5,00%	3.000.000.000
Masyarakat	220.000.000	36,67%	22.000.000.000
Jumlah	600.000.000	100,00%	60.000.000.000

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh.

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Grup berkomitmen untuk persyaratan permodalan eksternal tersebut membentuk cadangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 saat Perseroan telah dapat membukukan laba ditahan.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan rasio debt to equity dan rasio gearing.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020, rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Agio saham yang berasal dari penawaran umum perdana saham	440.000.000	440.000.000
Biaya emisi saham dari penawaran umum perdana saham	(2.163.709.962)	(2.163.709.962)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		
PT Bumi Majalengka Permai	(9.434.766.802)	(9.434.766.802)
PT Fitra Amanah Wisata	(50.140.269)	(50.140.269)
Jumlah	(11.208.617.033)	(11.208.617.033)

Berdasarkan akta notaris Rudy Siswanto No 25 tanggal 24 April 2018 entitas induk membeli saham PT Bumi Majalengka Permai dari PT Gloria Inti Nusantara dan Jon Fieris, pemegang saham, yang merupakan pihak yang berada dalam pengendalian yang sama, dengan harga beli sebesar nilai nominal saham Rp5.999.982.857 sehingga kepemilikan Perusahaan pada PT Bumi Majalengka permai sebesar 99,9997%.

Nilai buku aset neto PT Bumi Majalengka Permai yang dibeli oleh entitas induk pada pembelian saham diatas sebesar Rp3.434.783.945. Selisih antara harga beli saham dengan nilai buku aset neto sebesar Rp9.434.766.802 dicatat sebagai selisih nilai transaksi entitas sepengendali.

Berdasarkan akta notaris Rudy Siswanto No 25 tanggal 24 April 2018 entitas induk membeli saham PT Fitra Amanah Wisata dari PT Bumi Majalengka Permai dan Go Ronny Nugroho pemegang saham PT Gloria Inti Nusantara, yang merupakan pihak yang berada dalam pengendalian yang sama, dengan harga beli sebesar nilai nominal saham Rp249.900.000 sehingga kepemilikan Perusahaan pada PT Fitra Amanah Wisata sebesar 99,96%.

Nilai buku aset neto PT Fitra Amanah Wisata yang dibeli oleh entitas induk pada pembelian saham diatas sebesar Rp199.759.731. Selisih antara harga beli saham dengan nilai buku aset neto sebesar Rp50.140.269 dicatat sebagai selisih nilai transaksi entitas sepengendali.

19. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PT Bumi Majalengka Permai	61.818	67.165
PT Fitra Amanah Wisata	(3.915)	8.298
Jumlah	57.903	75.464

20. IMBALAN PASCA KERJA

Grup mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 26 Pebruari 2021, yang menggunakan metode *"Projected Unit Credit",*

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	6,88%	6,88%
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%
Tabel mortalita	(TMI) IV – 2019	(TMI) IV – 2019
Proporsi pengambilan pensiun normal	60 tahun	60 tahun
Metode	*Projected Unit Credit*	

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai "Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan" di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, dan beban imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, adalah sebagai berikut:

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	1.079.341.751	928.417.021
Nilai bersih liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian	1.079.341.751	928.417.021

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui laporan laba rugi komprehensif adalah:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	145.956.224	291.912.448
Biaya bunga	4.968.506	9.937.013
Jumlah	150.924.730	301.849.461

Mutasi estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	928.417.021	217.253.827
Beban manfaat karyawan	150.924.730	301.849.461
Pengakuan segera dari biaya jasa lalu	-	363.642.274
(Keuntungan) kerugian aktuarial	-	45.671.459
Liabilitas imbalan kerja	1.079.341.751	928.417.021

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

20. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dan tingkat kenaiakan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020:

		Liabilitas imbalan pasca kerja	
Asumsi	Perubahan asumsi	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	+ 1%	961.408.247	811.475.331
	- 1%	1.221.775.842	1.072.980.566
Tingkat kenaikan gaji	+ 1%	1.215.982.038	1.067.219.589
	- 1%	963.501.299	813.403.439

21. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Hotel	1.723.057.523	1.114.573.525
Banquet	863.915.720	218.879.349
Breakfast	620.088.563	436.242.609
Food & beverage	311.062.378	183.289.725
Laundry	37.449.139	55.669.935
Transportasi	206.612	42.304.651
Lainnya	11.811.302	14.049.777
Jumlah	3.567.591.237	2.065.009.571

Perseroan mengelola hotel yang sama dengan yang dikelola oleh entitas anak "PT Bumi Majalengka Permai", yaitu Hotel Fitra.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Penyusutan	1.475.484.059	1.345.136.938
Food & beverage	693.967.364	462.654.503
Telephone, listrik dan internet	439.537.754	364.915.214
Ammeneties	54.167.000	26.515.500
Pengharum dan pembersih	36.169.253	48.602.341
Gas dan solar	48.452.808	48.685.216
Air	41.550.282	34.089.162
Pest control	13.239.969	9.719.982
Tissue	9.197.492	8.965.160
BBM, tol dan parkir	5.591.632	24.970.423
Pengiriman	4.739.170	7.072.136
Chemical laundry	-	4.900.000
Jumlah	2.822.096.783	2.386.226.575

23. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Beban pemasaran		
Komisi & compliment	42.804.424	40.761.130
Iklan dan promosi	6.753.000	57.138.000
Beban umum dan administrasi		
Karyawan		
Gaji	1.431.409.920	1.316.025.501
Tunjangan hari raya	227.379.417	294.297.083
BPJS dan jamsostek	140.334.541	99.720.650
Pengobatan	19.423.117	10.143.200
Upah	17.437.500	7.213.500
Seragam	4.972.000	-
Tunjangan	4.664.500	14.723.000
Makan dan catering	1.170.000	99.181.000
Lainnya	845.000	7.175.900
Penyusutan	705.084.446	779.418.520
Profesional fee	203.500.000	227.500.000
Peralatan dan perlengkapan	152.142.641	73.401.598
Imbalan pasca kerja	150.924.730	52.196.899
Iuran	105.900.000	106.500.000
Perijinan	79.403.000	6.950.000
Cetakan	67.647.400	24.208.050
Transportasi	43.767.227	18.152.832
Program STAAH	39.458.990	39.895.839
Beban pajak	26.196.890	272.361.644
Konsultan pajak	25.500.000	18.000.000
ATK dan materai	14.828.094	10.212.779
Donasi dan sumbangan	11.701.046	8.532.431
Representasi	6.000.000	5.400.000
Service dan perawatan	4.192.827	2.871.788
Keamanan dan kebersihan	2.300.000	2.500.000
Jamuan	1.606.621	5.465.130
Buket bunga	859.000	375.000
Asuransi	500.000	22.436.117
Perjalanan dinas	150.000	7.083.000
Sewa	-	8.491.760
Pendaftaran	-	720.000
Lain-lain	2.489.200	2.028.200
Jumlah	3.541.345.531	3.641.080.551

24. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak kini

Rekonsilisasi antara laba (rugi) komersial yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan taksiran laba menurut fiskal adalah sebagai berikut:

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi	(3.847.958.882)	(8.682.541.781)
Yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beda waktu		
Beban imbalan pasca kerja	150.924.730	665.491.735
Beda tetap		
Representasi	6.000.000	5.400.000
Sumbangan	11.701.046	20.261.800
Beban pajak	21.372.486	305.894.653
Jamuan	1.606.621	10.987.187
Bunga jasa giro	(4.825.314)	(14.696.649)
Rugi fiskal	(3.661.179.313)	(7.689.203.055)
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(27.191.308.767)	(19.502.105.712)
Akumulasi rugi fiskal	(30.852.488.080)	(27.191.308.767)

Akumulasi rugi fiskal	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Perusahaan	(3.935.710.549)	(3.137.087.936)
Entitas anak		
PT Bumi Majalengka permai	(26.631.871.109)	(23.799.847.609)
PT Fitra Amanah Wisata	(284.906.422)	(254.373.222)
Jumlah	(30.852.488.080)	(27.191.308.767)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020 diatas menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Aset pajak tangguhan

	1 Januari 2021	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	30 Juni 2021
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	58.095.265	10.489.079	-	68.584.344
Penyesuaian tarif pajak	(1.106.691)	-	-	(1.106.691)
Entitas anak				
Liabilitas imbalan kerja	152.674.094	22.714.362	-	175.388.456
Penyesuaian tarif pajak	(5.410.923)	-	-	(5.410.923)
Jumlah	204.251.744	33.203.441	-	237.455.185

24. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Aset pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2020	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2020
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	9.222.429	48.407.164	465.673	58.095.265
Penyesuaian tarif pajak	-	(1.050.360)	(56.332)	(1.106.691)
Entitas anak				
Liabilitas imbalan kerja	45.091.028	98.001.018	9.582.048	152.674.094
Penyesuaian tarif pajak	-	(5.076.382)	(334.541)	(5.410.923)
Jumlah	54.313.457	140.281.440	9.656.848	204.251.744

25. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Nilai nominal semula	100	100
Niali nominal yang disajikan kembali	100	100
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula	600.000.000	600.000.000
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali	600.000.000	600.000.000
Rugi bersih entitas induk	(3.814.737.881)	(5.205.241.998)
Rugi per saham	(6,36)	(8,68)

26. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Entitas yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2020.

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan				
Kas dan setara kas	2.725.237.884	2.725.237.884	1.681.806.191	1.681.806.191
Piutang usaha	350.276.395	350.276.395	259.710.717	259.710.717
Piutang lain-lain	10.750.000	10.750.000	-	-
Jumlah	3.086.264.279	3.086.264.279	1.941.516.908	1.941.516.908
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	1.201.727.775	1.201.727.775	1.236.173.633	1.236.173.633
Biaya yang masih harus diba	1.218.454.138	1.218.454.138	1.092.347.277	1.092.347.277
Utang lain-lain	444.843.205	444.843.205	1.488.768.289	1.488.768.289
Utang pemegang saham	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Utang sewa pembiayaan	70.686.119	70.686.119	175.952.783	175.952.783
Utang bank	26.143.100.000	26.143.100.000	26.413.100.000	26.413.100.000
Jumlah	34.078.811.237	34.078.811.237	31.406.341.982	31.406.341.982

27. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Kerjasama Merchant Internet No. 85/PKS-M/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Midtrans sebagai Payment Gateway dengan PT Bumi Majalengka Permai Merchant.
b. Perjanjian Partisipasi Properti Akomodasi dengan Agoda 7 Juli 2017 oleh dan antara Agoda Pte, Ltd dibuat dibawah tangan oleh Agoda sebagai Agoda dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel
c. Perjanjian Akomodasi dengan Booking.com B.V. tanggal 7 Juli 2017 dibuat dibawah tangan antara Booking.com B.V. sebagai Booking.com dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.
d. Lodging Contract tanggal 7 Desember 2017 dibuat dibawah tangan oleh Expedia sebagai Expedia dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.
e. Perjanjian Pelayanan Pemesanan Hotel tanggal 26 Juni 2017 dibuat dibawah tangan antara PT Go Online Destinations (pegipegi.com) sebagai Pihak Pertama dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Kedua.
f. Perjanjian Kerjasama Hotel dengan Traveloka tanggal 19 September 2017 dibuat dibawah tangan antara Traveloka Services Pte. Ltd. sebagai Traveloka dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.
g. Perjanjian Pembelian dan Pemeliharaan Emerald System No. HTL/17/04/0009 tanggal 3 April 2017 antara PT Bumi Majalengka Permai Pihak Pertama dengan Emerald System Pihak Kedua yang mana perjanjian tersebut di perpanjang sesuai dengan Kontrak Pemeliharaan Piranti Lunak Emerald System No. MNT/2018/04/0006 tanggal 1 Juni 2018.
h. Perjanjian Kerjasama antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Pertama dengan PT Adipramana Multi Dinamika Pihak Kedua tanggal 30 Oktober 2018 untuk Program promosi dan pemasaran oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.
i. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan No. 01/XI/PKS/2018 tanggal 17 November 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) DPC Kerjasama penjualan package room hotel dan room meeting, penjualan package perjalanan wisata untuk pelanggan hotel, penyediaan kendaraan penjemputan pelanggan hotel dan taksi hotel.
j. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/IX/2019 tanggal 11 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Hotel dan PT Citilink Indonesia sebagai Pihak Tamu untuk Kerjasama penjualan paket kamar hotel dan meeting room.
k. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/IX/2019 tanggal 11 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan PT Garuda Indonesia untuk Kerjasama penjualan package room hotel dan room meeting.
l. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 310/JT-DZ/PKSH/KJT/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PT Lion Mentari sebagai pihak pertama dan PT Bumi Majalengka Permai untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Kedua bagi Pihak Pertama.
m. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 003/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Menara Islam untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.
n. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 004/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Sampoerna untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.
o. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Menara Islam Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.

28. INFORMASI SEGMEN

Segmen Operasi

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak penghasilan Entitas dikelola secara Kelompok Usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Pendapatan usaha		
Hotel	1.723.057.523	1.114.573.525
Banquet	863.915.720	218.879.349
Breakfast	620.088.563	436.242.609
Food & beverage	311.062.378	183.289.725
Laundry	37.449.139	55.669.935
Transportasi	206.612	42.304.651
Lainnya	11.811.302	14.049.777
Jumlah	3.567.591.237	2.065.009.571
Beban yang dapat dialokasikan		
Hotel	6.635.171.639	6.724.383.085
Banquet	346.983.682	161.929.076
Breakfast	242.888.577	231.327.252
Food & beverage	104.095.105	69.398.175
Laundry	-	4.900.000
Beban yang tidak dapat dialokasikan		
Lainnya	86.411.116	91.372.526
Jumlah	7.415.550.119	7.283.310.114
Rugi sebelum pajak penghasilan	(3.847.958.882)	(5.218.300.543)
Pajak penghasilan		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	33.203.441	13.049.225
Rugi bersih tahun berjalan	(3.814.755.441)	(5.205.251.318)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		
Pengukuran kembali imbalan pasti	-	-
Pajak atas penghasilan terkait	-	-
Rugi komprehensif tahun berjalan	(3.814.755.441)	(5.205.251.318)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Laba (rugi) kotor		
Hotel	(405.071.896)	(712.726.021)
Banquet	516.932.038	56.950.273
Breakfast	377.199.986	204.915.358
Food & beverage	206.967.273	113.891.550
Transportasi	37.449.139	42.304.651
Laundry	206.612	50.769.935
Lainnya	11.811.302	(77.322.749)
Jumlah	745.494.454	(321.217.004)

28. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

Segmen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Jumlah aset		
Hotel	60.550.763.251	63.065.436.413
Banquet	33.356.595	13.116.568
Breakfast	14.295.684	30.605.326
Food & beverage	7.043.362	7.114.406
Laundry	4.482.289	-
Jumlah	60.609.941.181	63.116.272.713
Jumlah liabilitas		
Hotel	35.233.146.367	30.551.698.823
Banquet	-	-
Breakfast	-	-
Food & beverage	-	-
Transportasi	-	-
Laundry	-	-
Jumlah	35.233.146.367	30.551.698.823

29. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi yang berkelanjutan dengan pihak berelasi.

Transaksi pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, Grup melakukan transaksi berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi, tidak ada transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama.

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Utang pemegang saham	5.000.000.000	1.000.000.000
Persentase dari jumlah liabilitas	14,19%	3,09%

Sifat transaksi dan hubungan pihak berelasi

- Jon Fieris merupakan pemegang saham Perusahaan.

Kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya untuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kerja dan pembayaran berbasis saham.

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak berelasi, dimana transaksi-transaksi tersebut merupakan pembebanan biaya dan/atau talangan untuk modal kerja yang tidak dikenakan bunga, tidak disertai jaminan dan seluruhnya dapat tertagih sesuai permintaan dari pemberi pinjaman *(demandable)*.

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Direksi memiliki tanggungjawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggungjawab untuk mengelola, mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Sedangkan fungsi internal audit memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan menelaah kecukupan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dengan memberikan laporannya kepada Direksi. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko - risiko yang dihadapi Perusahaan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan, namun tanpa terlalu mempengaruhi daya saing Perusahaan dan fleksibilitas.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih. Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kas dan setara kas	2.725.237.884	1.681.806.191
Piutang usaha	350.276.395	259.710.717
Piutang lain-lain	10.750.000	-
Jumlah	3.086.264.279	1.941.516.908

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 3 bulan.

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	30 Juni 2021		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Liabilitas keuangan			
Utang usaha	1.201.727.775	-	1.201.727.775
Utang lain-lain	444.843.205	-	444.843.205
Biaya yang masih harus dibayar	1.218.454.138	-	1.218.454.138
Utang bank	2.520.000.000	23.623.100.000	26.143.100.000
Utang sewa pembiayaan	61.829.164	8.856.955	70.686.119
Utang pemegang saham	5.000.000.000	-	5.000.000.000
Jumlah	10.446.854.282	23.631.956.955	34.078.811.237

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kekurangan atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisinis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perusahaan.

Kebijakan manajemen yaitu menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, pemeliharaan ataupun melakukan backup atas aplikasi utama perusahaan baik dari sisi hardware dan software untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menanamkan nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan sehingga dapat menghindarikan/mengurangi potensi penyimpangan, serta penilaian kinerja yang fair dan transparan dalam pengembangan karir.

Risiko permodalan

Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternative pendanaan pada biaya yang wajar. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka pemeliharaan dan mengelola struktur permodalan, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal dimasa yang akan datang.

31. SALDO DEFISIT

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perusahaan dan entitas anaknya akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya mengalami defisit pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp23.414.646.056. Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya ditahun-tahun yang akan datang akan memperoleh laba yang signifikan karena memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakuakan Manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Perencanaan Manajemen, antara lain:

- Melakukan efisiensi dan penghematan biaya disemua departemen.
- Memaksimalkan penyewaan convention hall, kami berkeyakinan akan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan terutama dari penyewaan ruangan rapat dan weeding dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Memaksimalkan kerja dari team Marketing untuk terus menjalin kerjasama dengan customer yang telah melakukan kerjasama dengan Perseroan dan akan terus mencari customer baru dengan melakukan kerjasama denga event organizer untuk pemasaran paket weeding, bazaar, pameran dan event-event lainnya.
- Terus berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman menginap di Hotel Fitra.

32. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada kegiatan operasional Perusahaan sampai saat ini. Manajemen Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan atas operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta berusaha meminimalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi dimasa depan yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan. Dikarenakan atas terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidak pastian dan belum dapat ditentukan.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Tambahan pengungkapan dan perubahan pada Catatan 1b, 7, 29, 34 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Entitas Induk, yang diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Entitas Induk pada tanggal 8 November 2021.